

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam era globalisasi seperti saat ini adalah tempat bagi banyak negara untuk melakukan hubungan kerjasama dengan negara-negara lain. Namun era globalisasi yang berkembang saat ini juga tidak menutup kemungkinan adanya konflik yang terjadi, baik yang terjadi di dalam negeri maupun yang terjadi antara negara satu dengan negara lainnya. Sebagai contoh negara yang intens dalam melakukan hubungan kerjasama yakni antara Tiongkok dan Jepang, namun tidak dapat dipungkiri juga selain intens dalam pelbagai kerjasama kedua negara, Tiongkok dan Jepang juga terbilang sering mengalami pasang surut konflik bilateral.

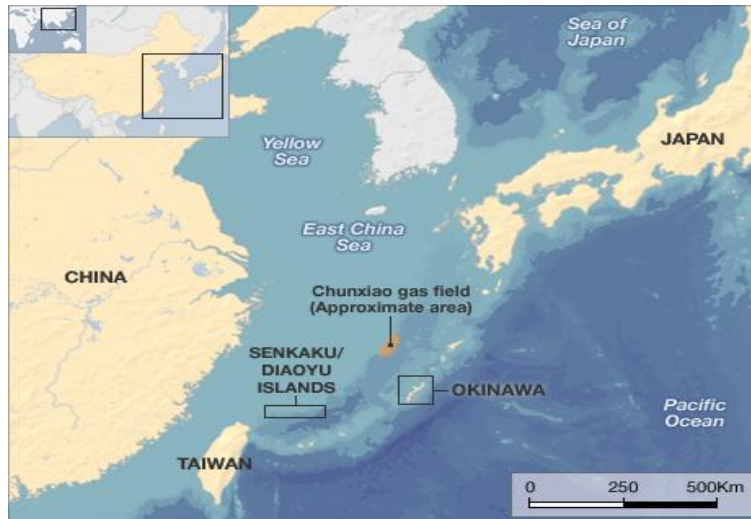
Dalam fokus perekonomian, Tiongkok dan Jepang adalah dua negara serumpun yang memiliki laju perekonomian yang sangat maju dengan didukung oleh teknologi-teknologi mutakhir, sehingga tidak dipungkiri lagi kedua negara tersebut adalah negara yang sangat berpengaruh bagi ASIA dan dunia. Jika dilihat dari Indeks pertumbuhan ekonomi negara-negara di kawasan Asia Timur yang tergolong maju disebabkan karena kemajuan teknologi dalam berbagai bidang, seperti teknologi otomotif, teknologi komunikasi serta teknologi robotik yang mumpuni bila dibandingkan dengan negara lain. Didukung dengan letak geografis negara-negara di kawasan tersebut yang sangat strategis bagi hubungan antar

negara yang berada di kawasan Asia Timur. Selain itu persamaan adat istiadat di kawasan tersebut juga memiliki pengaruh penting dalam kemajuan ekonomi.

Tiongkok dan Jepang merupakan dua negara dengan tingkat kerjasama yang baik di segala bidangnya, namun kedua negara tersebut juga tengah menjadi perhatian dunia saat ini, yakni dikarenakan keterlibatannya atas sengketa perebutan Pulau Diaoyu (Jepang menyebutnya Senkaku). Hal tersebut disebabkan karena Pemerintah Jepang memutuskan untuk membeli tiga dari lima jumlah pulau di Kepulauan Diaoyu termasuk Pulau Diaoyu seharga 2,05 miliar yen.¹ Tak pelak, keputusan Jepang membeli tiga dari lima jumlah pulau di kepulauan Diaoyu tersebut mengundang aksi protes pemerintah Tiongkok turut meningkatkan suhu ketegangan di antara Tiongkok dan Jepang. Disisi lain, sengketa tersebut didukung oleh pernyataan Komisi Ekonomi PBB untuk Asia dan Timur Jauh (ESCAPE) pada tahun 1969 yang menyatakan bahwa di sekitar Pulau Diaoyu terdapat banyak potensi sumber daya alam berupa minyak bumi, gas alam, dan hidrokarbon.

¹ <http://www.antaraneews.com/berita/334774/40-tahun-hubungan-diplomatik-jepang-china-ditangguhkan/> diakses 24 Januari 2013

Gambar 1.1



Sumber: <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11341139>

Dari gambar diatas dapat terlihat bahwa Pulau Diaoyu terletak sekitar timur-laut Taiwan dan barat-daya Okinawa. Kepulauan ini terdiri dari 8 (delapan) pulau terdiri dari 5 pulau kecil dan 3 pulau batu dengan pulau terbesarnya adalah *Diaoyu Dao* (釣魚島) dalam bahasa China atau *Uotsuri-jima* (魚釣島) dalam bahasa Jepang dengan luas sekitar 4.3 Kilometer persegi.²

Jepang membangun mercusuar guna melegitimasi Pulau Diaoyu, serta Jepang secara rutin mengeksploitasi perikanan dan gas alam di Pulau Diaoyu. Disitulah puncak sengketa Pulau Diaoyu yang mengakibatkan kapal Taiwan diusir oleh Jepang dari Pulau Diaoyu. Keterlibatan Taiwan dalam sengketa Pulau Diaoyu sebenarnya hanya didasarkan pada nelayan Tiongkok yang menggunakan Pulau Diaoyu sebagai basis operasional yang pada saat itu Pulau Diaoyu termasuk

² <http://www.bbc.co.uk/news/world-asia-pacific-11341139> diakses 2 Januari 2014

dalam wilayah Taiwan. Namun Taiwan sendiri tidak memiliki patokan politik yang jelas karena Taiwan hanya membonceng kebijakan yang ditempuh Pemerintah Tiongkok. Pemerintah Jepang sendiri mengklaim bahwa kepemilikan Jepang atas Pulau Diaoyu diyakini sejak tahun 1609, yakni pada saat kelompok nelayan Jepang menduduki wilayah Kerajaan Ryuku dan membayar upeti kepada Shogun setempat. Dikarenakan sebagian wilayah Jepang pada saat itu masih tertutup oleh perdagangan yang masuk dari Tiongkok, maka Kerajaan Ryuku menjadikan Kepulauan Diaoyu sebagai dermaga untuk persinggahan kapal-kapal baik yang akan menuju ke Tiongkok atau yang masuk dari Tiongkok. Serta kawasan tersebut dapat menghindarkan kapal-kapal perdagangan dari badai, oleh karenanya pada masa itu Pulau Diaoyu menjadi sebuah kawasan terpenting bagi pelayaran yang menghubungkan antara Tiongkok dan Jepang dan dari seluruh dunia.

Melihat sejarah yang dipaparkan oleh pemerintah Jepang tersebut tak lantas membuat Tiongkok mengakui bahwa Pulau Diaoyu adalah bagian yang tak terpisahkan dari Jepang. Tiongkok menganggap bahwa Jepang mengingkari sejarah yang tertulis sebelum masa itu dan menganggap bahwa upeti yang dibayarkan kepada Kerajaan Ryuku merupakan bentuk dari suap oleh kaum nelayan sebagai penduduk setempat kepada pemerintah dalam hal ini adalah Kerajaan Ryuku. Guna meredam tekanan di antara kedua negara, Tiongkok dan Jepang, Jepang dalam hal ini memutuskan untuk membeli Pulau Diaoyu dari milik perseorangan yakni nelayan yang menduduki Pulau Diaoyu guna melegalkan kembali kepemilikan Pulau Diaoyu dan melakukan eksplorasi sumber daya alam

di pulau tersebut serta melakukan kekuasaan pengendalian secara sah menurut Hukum Internasional.

Oleh karena antara Tiongkok dan Jepang sama-sama tidak memperoleh kesepakatan mengenai fakta, hukum, dan politik yang dijabarkan di atas. Maka masing-masing negara yang bersengketa memiliki pendekatan-pendekatan yang diyakini dapat meyakinkan dunia internasional perihal pemilik sah atas Pulau Diaoyu. Pendekatan yang dilakukan oleh masing-masing negara bersengketa juga termasuk bukti-bukti klaim dan penolakan klaim terhadap Pulau Diaoyu

Jepang telah mencoba berbagai upaya untuk mempertahankan atau menggunakan kedaulatannya dalam Pulau Diaoyu, seperti membangun mercusuar dan melakukan patroli rutin di sekitaran pulau tersebut sejak abad ke-19. Serta Jepang meyakini bahwa Tiongkok mengklaim pulau tersebut sesaat setelah mengetahui bahwa di dalamnya ditemukan kandungan sumber daya alam yang melimpah. Dan pada tanggal 14 Januari 1895, Pemerintah Jepang menetapkan bahwa Kepulauan Diaoyu sebagai bagian dari wilayah Nansei Shoto.³

Mengajukan persengketaan atas klaim Pulau Diaoyu ke dalam wewenang Hukum Internasional akan menjadi jalan terakhir bagi Jepang apabila Tiongkok tidak mengakui keberadaan Pulau Diaoyu sebagai bagian dari kedaulatan Jepang, namun yang harus menjadi pertimbangan Pemerintah Jepang terhadap rencana pengajuan tersebut adalah pengaruh Tiongkok yang sangat tinggi terhadap dunia saat ini melalui pengaruh ekonomi yang dimiliki Tiongkok.

³ <http://www.mofa.go.jp/region/asia-paci/senkaku/index.html> Diakses 3 Januari 2013

Lain hal dengan pendekatan yang dilakukan Pemerintah Tiongkok guna mematahkan klaim Jepang atas Pulau Diaoyu, Tiongkok menggunakan dua pendekatan yang berbeda. Pendekatan pertama dengan menggunakan data-data dan bukti-bukti kepemilikan Pulau Diaoyu pada masa kepemimpinan Dinasti Ming dan Dinasti Qing. Disebutkan bahwa peta yang tergambar menyebutkan bahwa Kepulauan Diaoyu merupakan bagian dari kekaisaran Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada tahun 1403. Selain itu Tiongkok menyebutkan bahwa pada dokumen sejarah Jepang telah disebutkan bahwa Kepulauan Diaoyu adalah bagian dari wilayah kedaulatan Tiongkok. Dalam dokumen tersebut yang ditulis oleh Hayashi Shihei tahun 1785, pada waktu pemerintahan Jepang dipimpin oleh Tokugawa Shogunate disebutkan bahwa Kepulauan Diaoyu bukan merupakan bagian dari Kerajaan Ryuku. Hal tersebut dituliskan dalam sejarah pemerintahan Jepang secara berturut-turut pada tahun 1874 dan 1877 yang menyebutkan bahwa Kepulauan Diaoyu bukan merupakan bagian dari teritorial Jepang.

Tiongkok meyakini bahwa dengan dipaparkannya bukti di atas, maka Jepang tidak berhak atas Pulau Diaoyu dan Pulau Diaoyu bukan merupakan bagian dari teritorial Jepang. Serta Tiongkok dapat menggunakan kekuatan dan kekuasaan penuh terhadap siapa saja yang mengklaim Pulau Diaoyu. Disamping perebutan mengenai batas wilayah antara Tiongkok dan Jepang, Pulau Diaoyu yang hingga kini masih menjadi sengketa antar dua negara raksasa Asia Pasifik ini juga menyimpan banyak Sumber Daya Alam. Bukan hanya perikanan dan jalur penting pelayaran, di sekitar kepulauan ini juga terdapat kandungan gas alam, nikel, mangan, kobalt, dan lain sebagainya.

Dalam Hukum Laut (UNCLOS) 1982 sudah diatur pembagian hukum maritim bagi sebuah negara yakni;

1. Laut yang merupakan bagian dari wilayah kedaulatannya (yaitu laut teritorial, Laut pedalaman)
2. Laut yang bukan merupakan wilayah kedaulatannya namun negara tersebut memiliki hak-hak dan yurisdiksi terhadap aktifitas-aktifitas tertentu yaitu di zona tambahan, Zona Ekonomi Eksklusif.
3. Laut yang berada di luar dua di atas. Yang artinya bukan wilayah kedaulatannya dan bukan merupakan hak-hak yurisdiksi namun negara tersebut memiliki kepentingan.⁴

Berpedoman pada Hukum Laut UNCLOS 1982, seharusnya sudah jelas bagaimana posisi sebuah negara atas hukum maritim termasuk di dalamnya peta pengukuran yang jelas atas sebuah pulau yang diapit oleh kedua negara, namun Tiongkok dan Jepang tetap pada pemahaman sendiri mengenai perbatasan Pulau Diaoyu. Jepang berpendapat bahwa posisi Pulau Diaoyu berada pada Zona Ekonomi Eksklusifnya, yakni berjarak 200 mil dari garis dasar pantai terluar Jepang dan bersifat sementara hingga kedua negara, Tiongkok dan Jepang dapat mencapai kesepakatan bersama. Sedangkan Tiongkok berpendapat bahwa Pulau Diaoyu menjadi bagian teritorial Tiongkok berdasarkan pada kelanjutan alamiah dari landasan kontinennya yang berjarak diluar 200 mil dari garis dasar pantai. Tiongkok memiliki pandangan lain mengenai paham batas wilayah perairan. Menurut Pemerintah Tiongkok, harus ada sebuah perjanjian diantara kedua negara

⁴ Windari, Retno, SH, Msc. (2009). *Hukum Laut, Zona-Zona Maritim sesuai UNCLOS 1982 dan Konvensi-Konvensi Bidang Maritim*, Jakarta: Badan Koordinasi Keamanan Laut, hlm 20

terhadap pengambilan garis tengah untuk pengukuran Zona Ekonomi Eksklusif agar tercapai solusi adil bagi kedua negara.⁵

Persengketaan antara Tiongkok dan Jepang atas klaim Pulau Diaoyu jelas membutuhkan perhatian khusus dari PBB. Sebagai fasilitator keamanan internasional, PBB bukan tidak peduli dengan sengketa yang melibatkan dua raksasa Asia tersebut. Sengketa tersebut juga menjadi pokok bahasan dalam Forum Sidang Umum PBB ke-67 di New York. Sidang PBB di New York menjadi wadah bagi Menteri Luar Negeri kedua negara untuk berunding perihal sengketa wilayah Pulau Diaoyu. Namun kedua negara yang terlibat persengketaan tersebut sama-sama menolak untuk berdamai dan sama-sama berkeras bahwa Pulau Diaoyu adalah bagian dari teritori negaranya.

Seperti yang terjadi akhir-akhir ini saat Menteri Luar Negeri Tiongkok, Yang Jiechi menyatakan bahwa tidak akan mentolerir tindakan Jepang atas klaim Pulau Diaoyu. Menteri Luar Negeri Tiongkok menyatakan bahwa Jepang telah menafikan fakta-fakta sejarah Pulau Diaoyu dan tidak mematuhi hukum internasional yang berlaku. Yang Jiechi juga menegaskan bahwa Pulau Diaoyu adalah bagian yang tidak dapat terpisahkan dari Tiongkok. Jepang sendiri melalui Perdana Menteri Yoshiko Noda menyatakan Pulau Diaoyu adalah bagian yang tidak terpisahkan dari Jepang, serta dalam Hukum Internasional juga mengakui bahwa Pulau Senkaku adalah milik Jepang. Dalam aksinya Jepang juga mengirimkan kapal-kapal patrolinya untuk menjaga kawasan Pulau Diaoyu dan

⁵ <http://internasional.kompas.com/read/2012/09/24/05341379/Senkaku.antara.Jepang.dan.China/>
diakses 24 Januari 2013

mengusir nelayan-nelayan Tiongkok dan Taiwan yang berusaha untuk mendekati kawasan Pulau Diaoyu.

Menaiknya suhu ketegangan antara Tiongkok dan Jepang tak pelak berpengaruh di banyak bidang. Selain hubungan bilateral antara Tiongkok dan Jepang yang tegang, dari sisi ekonomi juga turut mengganggu kestabilan masing-masing negara. Adapun Beijing saat ini melancarkan aksi protes keras terhadap Tokyo, sedangkan Tokyo juga turut melancarkan aksi yang tak kalah keras sehingga kedua aksi protes tersebut sangat mengganggu hubungan perekonomian diantara keduanya. Hal tersebut dibuktikan dengan Tiongkok menutup semua pabrik otomotif serta toko-toko milik Jepang sehingga mengganggu jalannya roda perekonomian Jepang karena harus menarik semua penjualan dan karyawan Jepang dari Tiongkok.⁶

B. Tujuan Penulisan

Penulisan ini diharapkan dapat memberikan banyak manfaat, antara lain :

1. Memberikan Deskripsi/gambaran mengenai kepentingan Tiongkok terhadap konflik Kepulauan Diaoyu yang saat ini masih disengketakan dengan Jepang.
2. Menjelaskan dinamika konflik yang terjadi antara Tiongkok dan Jepang mengenai klaim Jepang atas Kepulauan Diaoyu.
3. Guna menerapkan teori-teori serta konsep Ilmu Hubungan Internasional yang berhubungan dengan masalah tersebut.

⁶ <http://www.seputar-indonesia.com/ediscetak/content/view/529055/> diakses 19 Desember 2012

C. Pokok Permasalahan :

Topik permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan ini berdasarkan pemaparan di atas adalah: “ **Mengapa Tiongkok menolak Klaim Jepang terhadap Pulau Diaoyu?**”

D. Kerangka pemikiran

Konsep Kepentingan Nasional

Untuk membahas pokok permasalahan di atas maka penulis menggunakan konsep kepentingan nasional. Menurut Jack C. Plano dan Roy Olton dalam bukunya *The International Relation Dictionary*, mendefinisikan kepentingan nasional sebagai:

“National Interest is the fundamental and ultimate determine that guides the decision makers of state in making foreign policy. The national interest of a state typically a highly generalized conception of those elements that constitute the state’s most vital needs. The includes self preservation, independence, teritorial integrity, military security and economic well being”.⁷

(Kepentingan nasional adalah faktor mendasar dan pokok yang menuntun para pembuat keputusan luar negeri suatu negara. Kepentingan nasional suatu negara merupakan suatu konsep yang masih umum dan khas dari beberapa elemen yang merupakan keinginan sangat vital yang termasuk

⁷ Jack c.Plano dan Roy olton, *The International Relations Dictionary*, Third Edition Western Michigan University (ABL-Clio, California 1980), hlm 9

dalam elemen tersebut adalah mempertahankan kemerdekaan, integritas wilayah, keamanan militer, dan kesejahteraan ekonomi).

Dari beberapa elemen vital tersebut, kepentingan ekonomi adalah hal penting dari sebuah negara sebagai sarana dalam menjaga kepentingan nasional guna menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat. Hal itulah yang menjadikan Tiongkok mempertahankan Pulau Diaoyu dari klaim Jepang, karena hal tersebut merupakan kepentingan bagi Pemerintah Tiongkok dan masyarakatnya untuk pemanfaatan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya untuk kepentingan ekonomi Tiongkok.

Teori Pembuatan Politik Luar Negeri

Proses pembuatan politik luar negeri dapat berlangsung terus menerus seiring dengan situasi internasional yang berubah-ubah. Dalam hal ini, pembuatan politik luar negeri lebih tepat digunakan untuk menggambarkan sebuah situasi tunggal serta tindakan negara dalam menjangkau tujuan nasionalnya.⁸

Jack C. Plano dan Roy Olton menjelaskan bahwa terdapat beberapa proses dalam pembuatan politik luar negeri sebuah negara yang mencakup, menjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk sasaran yang spesifik, menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri, menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki, mengembangkan perencanaan atau strategi untuk memakai kapabilitas nasional dalam menanggulangi variabel tertentu sehingga mencapai tujuan yang telah ditetapkan, melaksanakan tindakan

⁸ Jack C. Plano & Roy Olton. 1982. *The International Relation Dictionary*, England: Clio PressLtd. hal. 6

yang diperlukan, dan secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan atau hasil yang dikehendaki.⁹

Dari proses yang sudah dijelaskan di atas, penetapan faktor situasional pada lingkup domestik Tiongkok ialah berupa kebutuhan Tiongkok akan Sumber Daya Alam yang terkandung di bawah permukaan Pulau Diaoyu untuk dapat memenuhi kebutuhan akan bahan bakar fosil pada perindustrian dan masyarakat pada umumnya. Sedangkan faktor situasional pada lingkup internasional ialah mengenai keamanan, oleh karena itu Tiongkok memberikan penjagaan dan pengamanan di sekitar Pulau Diaoyu dengan berbagai cara, sebagai contoh Pemerintah Tiongkok yang giat melakukan patroli rutin di perairan sekitar pulau yang disengketakan tersebut. Pemerintah Tiongkok memiliki kapabilitas nasional yakni dengan meningkatkan sistem pertahanan dan teknologi militer dan kebijakan keamanan di Pulau Diaoyu. Dalam penerapannya, proses pembuatan politik luar negeri sering tidak berlangsung secara kronologis, seringkali beberapa proses pembuatan politik luar negeri berlangsung secara simultan.

Teori pembuatan politik luar negeri juga merupakan strategi atau tindakan terencana yang dikembangkan oleh para pembuat keputusan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu sesuai dengan tujuan nasionalnya.¹⁰

E. Hipotesa

Dalam konflik yang terjadi antara Tiongkok dan Jepang atas Pulau Diaoyu, Tiongkok menolak klaim Jepang atas Pulau Diaoyu dalam upayanya

⁹ *Ibid.* hal. 5

¹⁰ Jackson, Robert & Georg Sorensen. 2009. *Pengantar Studi Hubungan Internasional*, Jakarta: Pustaka Pelajar. hal. 89

mempertahankan kepentingan nasional di bidang ekonomi yang sangat penting bagi Tiongkok.

F. Jangkauan Penelitian

Dalam upaya untuk menghindari penulisan ilmiah yang meluas, maka dilakukan penyempitan masalah yang kemudian dapat diaplikasikan melalui jangkauan penelitian. Kemudian penulisan ini difokuskan pada pasca Perang Dunia II hingga 1997 serta tahun 2009 hingga 2013, dimana dalam kurun waktu tersebut kasus sengketa Pulau Diaoyu antara Tiongkok dan Jepang menjadi fokus internasional mengingat posisi kedua negara yang sangat strategis dan dapat berpengaruh terhadap perekonomian global.

G. Metode Penelitian

Pengumpulan data dalam penulisan ilmiah ini menggunakan studi pustaka, sehingga data yang diperoleh dan diolah adalah data sekunder yang terdapat pada literatur, buku, majalah, surat kabar, jurnal, dan sumber-sumber lain yang relevan dengan permasalahan dalam penulisan ilmiah ini.

H. Sistematika Penulisan

- Bab I Berisikan pendahuluan, dimana tertulis rangkuman penelitian singkat mengenai permasalahan yang akan diteliti. Di dalamnya terdapat latar belakang masalah, pokok permasalahan, kerangka pemikiran yang nantinya digunakan sebagai bahan acuan bagi penulis untuk menyusun bab-bab selanjutnya.
- Bab II Membahas mengenai dinamika konflik yang terjadi antara Tiongkok dan Jepang yang terjadi pasca Perang Dunia ke II hingga sekarang terkait klaim masing-masing negara terhadap Pulau Diaoyu.
- Bab III Membahas mengenai strategi kebijakan luar negeri Tiongkok yang dilakukan dalam menghadapi Jepang terhadap klaimnya atas Pulau Diaoyu sehingga dapat menolak klaim yang dilakukan Jepang.
- Bab IV Membahas mengenai potensi yang terdapat di Pulau Diaoyu sehingga Tiongkok menolak klaim Jepang dan mempertahankan pulau tersebut.
- Bab V Merupakan penutup yang di dalamnya terdapat kesimpulan dari permasalahan tersebut.